

**MEMBANGUN MODEL PENGADILAN PEMILU DALAM
RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA
BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL**

TESIS

Oleh:

NAMA : AGUS WIDJAJANTO

NIM : 2102190042



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**MEMBANGUN MODEL PENGADILAN PEMILU
DALAM RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA
BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Hukum Universitas
Kristen Indonesia

Oleh:

NAMA : AGUS WIDJAJANTO

NPM : 2102190042



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Agus Widjajanto, S.H.
Nim : 2102190042
Program studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul : Membangun Model Pengadilan Pemilu Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Pilkada Berdasarkan Asas Kepastian Hukum Yang Adil adalah :

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, buku-buku, dan jurnal acuan yang tertera di dalam refrensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah di publikasikan atau yang pernah di pakai untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara refrensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam refrensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang di nyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta
Tanggal : 23 Mei 2023

AGUS WIDJAJANTO, S.H.
Nim : 2102190042





UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**MEMBANGUN MODEL PENGADILAN PEMILU DALAM RANGKA
PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA BERDASARKAN ASAS
KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL**

Oleh

Nama : AGUS WIDJAJANTO, S.H.
Nim : 2102190042
Program studi : Hukum Program Magister
Fakultas : Hukum Tata Negara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang tugas akhir guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Jakarta Tanggal 23 Mei 2023
Mengetahui

Pembimbing I

Dr. Poltak Sringoringo, S.H., M.H.
NIDN:0326116401

Pembimbing II

Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H.
NIDN:0302117904

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.
NIDN/NIDK : 141104/032 7096 504

Direktur
Program Pascasarjana

Prof. Dr. dr. Barnadetha Nadeak, M.pd., PA.
NIDN/NIDK : 001473/032 0116 402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS WIDJAJANTO, S.H.
Nim : 2102190042
Fakultas : Hukum
Program studi : Magister Ilmu hukum
Jenis Tugas akhir : Tesis
Judul : MEMBANGUN MODEL PENGADILAN PEMILU DALAM RANGKA
PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA BERDASARKAN
KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL

Menyatakan Bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya, dengan arahan dari Dosen pembimbing, dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah di publikasikan atau yang pernah di pakai untuk mendapat gelar akademik di perguruan tinggi manapun.
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan di cantumkan sebagai refrensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Saya memberikan hak noneksklusif tanpa royalti kepada Universitas Kristen Indonesia, yang berhak menyimpan, menggalih media / format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari di temukan Pelanggaran hak cipta dan kekayaan intelektual atau peraturan perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku

Dibuat di . Jakarta
Tanggal : 23 Mei 2023
Yang menyatakan

AGUS WIDJAJANTO, S.H.
Nim 2102190042



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan YME dengan hidayah dan pertolongan-Nya telah banyak memberikan berbagai kemudahan dalam penulisan tesis ini. Tesis yang berjudul “Membangun Model Pengadilan Pemilu Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Pilkada Berdasarkan Asas Kepastian Hukum Yang Adil” pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan praktis dalam penerapan, selain kegunaan teoretis bagi keilmuan hukum.

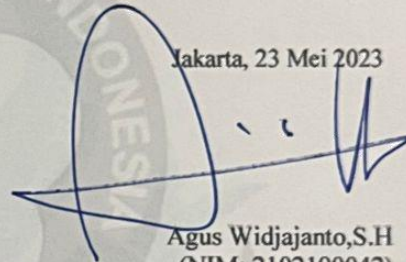
Terselesainya penulisan ini tidak lepas dari arahan dan masukan para pihak yang sangat membantu penulis. Pada kesempatan ini, ijinilah penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang terhormat, sebagai berikut:

1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti jenjang pendidikan Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, sehingga sampailah penulis menyelesaikan penelitian tesis ini;
2. Dr. Wiwik Sri Widiarty, SH., M.H., selaku Kepala Program Studi Hukum Program Magister Universitas Kristen Indonesia beserta jajarannya yang telah membantu dalam penyelenggaraan sidang tesis ini;
3. Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan pencerahan dan masukan yang sangat berharga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sesuai dengan arahan;
4. Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan arahan serta masukan dalam kepentingan penulisan tesis ini;
5. Para Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah banyak memberikan materi keilmuan dalam kesempatan pertemuan perkuliahan yang interaktif dan bersemangat;
6. Rekan-rekan seangkatan penulis yang juga mendorong dan memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Segenap staff administrasi Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan bantuannya kepada penulis selama dalam perkuliahan hingga berjalannya sidang tesis ini.
8. Orang tua penulis, ayahanda dan ibunda yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa perhatian dan kasih-sayang yang tiada tara.

9. Istri terkasih dan anak-anak tersayang, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Dengan caranya masing-masing telah banyak membantu keperluan penulis; dan
10. Pihak-pihak lainnya yang telah memberikan bantuannya baik langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu, namun tidaklah mengurangi rasa hormat penulis.

Penulis menyadari, tentulah masih ada saja beberapa kekurangan dalam naskah tesis ini. Hal tersebut terjadi, mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan penulis. Untuk itu, saran dan kritik yang membangun selalu penulis nantikan dalam rangka penyempurnaan seperlunya. Demikianlah kata pengantar ini disampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi diri penulis, keluarga, agama, bangsa dan negara Republik Indonesia yang tercinta, menggelora selalu dalam sanubari.

Jakarta, 23 Mei 2023



Agus Widjajanto, S.H
(NIM: 2102190042)

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	Ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kerangka Teoritis.....	6
1.4.1 Teori Kedaulatan Rakyat.....	6
1.4.2 Teori Kepastian Hukum.....	9
1.4.3 Teori Keadilan	11
1.4.4 Teori Sistem Hukum.....	16
1.5 Metode Penelitian	18
1.5.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	18
1.5.2 Jenis Dan Sumber Data	19
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....	20
1.5.4 Teknik Analisa Data.....	21
1.6 Sistematika Penulisan	22
BAB II PEMILU DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA	23
2.1 Asas Dan Prinsip Pemilihan Umum.....	23
2.2 Pemilu Dalam Negara Demokrasi.....	33
2.3 Pilkada Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.....	39
BAB III PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA MELALUI MAHKAMAH KONSITUSI.....	39
3.1 Sengketa pilkada dalam berbagai putusan mahkamah konstitusi.....	39
3.2 Pelanggaran STM dalam putusan mahkamah konstitusi.....	50

3.2.1 Pelanggaran yang bersifat STM kumulatif dan signifikan	50
3.2.1.1 Putusan nomor 41/PHPU.D-VI/2008	50
3.2.1.2 Putusan nomor 45/PHPU.D-VIII/2010	52
3.2.2 Pelanggaran yang bersifat STM alternatif dan signifikan	54
3.2.2.1 Putusan nomor 44/PHPU.D-VI/2008	54
3.3 Problem Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian	
Sengketa Pemilu.....	61
3.4 Problem Waktu Penyelesaian Sengketa Pemilu Oleh Mahkamah	
Konstitusi	70
BAB IV PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS PEMILU	72
4.1 Studi banding penyelesaian perselisihan pemilu oleh mahkamah	
Konstitusi	72
4.1.1 Austria	74
4.1.2 Jerman	75
4.1.3 Azerbaijan	78
4.2 Lingkup Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilu Oleh Lembaga	
Peradilan Khusus	79
4.2.1 Tribunal Superior Elektoral Brazil	79
4.2.2 Tribunal Federal Elektoral Meksiko	81
4.2.3 Filipina Commission On Election/Comelec	83
4.3 Pengadilan pemilu guna mewujudkan kepastian hukum yang adil	85
BAB V PENUTUP	109
5.1 Kesimpulan	109
5.2 Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111

**MEMBANGUN MODEL PENGADILAN PEMILU DALAM
RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA
BERDASARKAN ASAS KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL
ABSTRAK**

OLEH : AGUS WIDJAJANTO, S.H.

Model penyelesaian sengketa Pilkada melalui Mahkamah Konstitusi masih terdapat permasalahan dengan adanya multilisme kelembagaan dalam penyelesaian sengketa Pilkada. Penyelesaian sengketa Pilkada dipandang belum memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Disebutkan demikian, oleh karena proses upaya hukum yang berlapis-lapis dan terpisah dalam beberapa lingkup peradilan yang berbeda. Selain itu adanya kesulitan memenuhi ketepatan waktu penyelesaian sengketa dalam waktu yang demikian singkat.

Rumusan masalah penelitian adalah pertama bagaimana proses penyelesaian sengketa Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi selama ini, apakah telah mampu mewujudkan kepastian hukum yang adil? Kedua, bagaimana membangun suatu model penyelesaian sengketa Pilkada melalui Pengadilan Pemilu yang lebih menjamin kepastian hukum yang adil? Jenis penelitian menggunakan jenis doktrinal (normatif). Pendekatan penelitian yakni pendekatan undang-undang, konseptual, pendekatan kasus dan perbandingan. Sumber data penelitian adalah data sekunder dengan pendekatan analisis kualitatif.

Dalam hal kelembagaan penyelesaian sengketa Pilkada, harus dibentuk Pengadilan Khusus Pemilu. Pengadilan Pemilu terhubung dengan penegakan hukum atas pelanggaran Pemilu yang tidak mungkin diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Urgensi dibentuknya Pengadilan Pemilu juga untuk menjamin terselenggaranya asas-asas penyelenggaraan Pemilu dan prinsip kepastian hukum yang adil. Dengan demikian, kedudukan Bawaslu hanya sebatas lembaga pengawas. Adapun Mahkamah Konstitusi tidak lagi mengadili perselisihan hasil Pemilu. Dengan hadirnya Pengadilan Pemilu, maka persengketaan perolehan suara dapat diselesaikan secara terintegrasi

Kunci : Sengketa Pilkada, Multilisme, Pengadilan Pemilu, Aksiologi Hukum.

Creating a Model Election Court Based on the Principle of Fair Legal Certification for the Resolution of Election Disputes

ABSTRACT

Written by AGUS WIDJAJANTO, S.H.

The Constitutional Court's strategy for resolving election disputes still has issues with the regional election dispute settlement system's institutional pluralism. The resolution of regional election disputes is perceived as falling short of a feeling of justice and certainty in the law. This is mentioned because the judicial system is complex and divided into numerous courts. Additionally, it can be challenging to resolve disputes in a timely manner in such a short period of time.

The study problem is formulated as follows: first, how has the Constitutional Court handled challenges arising from local elections so far? Has it succeeded in establishing just legal certainty? Second, how can we create a system that ensures more equitable legal certainty when addressing regional election issues through the Election Court? Research of this kind employs a normative (doctrinal) type. Legislative, conceptual, case-based, and comparative research methodologies are used. The secondary data used in the research are analysed using a qualitative methodology.

A special election court must be created in order to resolve electoral disputes on an institutional level. For election breaches that the Constitutional Court is unable to address, the Election Court collaborates with law enforcement. The urgent need for an electoral court is essential to ensure that the values of fair elections and legal clarity are upheld. As a result, Bawaslu can only have a supervisory post. Election result appeals are no longer heard by the Constitutional Court. Conflicts regarding the acquisition of votes can be settled cohesively in the presence of the Election Court.

Election Court, Multilism, Election Disputes, and Legal Axiology are important.